

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi yang pesat tentu membuat setiap perusahaan untuk berlomba – lomba meraih keuntungan atau laba. Laba yang diperoleh dapat menjadi sumber investasi maupun dapat mengevaluasi kinerja manajemen yang dapat dilihat melalui laporan keuangan, karena hasilnya diharapkan dapat berkontribusi bagi kegiatan operasional perusahaan dan pengambilan keputusan oleh pihak – pihak yang berkepentingan.

Menurut Standar Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan.

Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen, atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Pemakai yang ingin melihat apa yang telah dilakukan oleh manajemen atau pertanggungjawaban manajemen berbuat demikian agar mereka dapat membuat keputusan ekonomi. Keputusan ini mencakup, misalnya, keputusan untuk menahan atau menjual investasi mereka dalam perusahaan atau keputusan untuk mengangkat kembali atau mengganti manajemen.

Menurut Iqbal dalam Shierly Pricilia dan Liana Susanto, 2017 [1], laporan keuangan seringkali disalahgunakan oleh manajemen dengan melakukan perubahan dalam penggunaan metode akuntansi, sehingga akan mempengaruhi jumlah laba yang ditampilkan dalam laporan keuangan. Salah satu jenis laporan keuangan yang mengukur keberhasilan operasi perusahaan untuk suatu periode tertentu adalah laporan laba rugi. Akan tetapi angka laba yang dihasilkan dalam laporan laba rugi seringkali dipengaruhi oleh metode akuntansi yang digunakan Kieso, Weygandt, & Warfield, 2015 [2],

Adapun jenis laporan keuangan yang lazim dikenal adalah neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas dan laporan perubahan posisi keuangan. Informasi keuangan yang dapat menunjukkan prestasi perusahaan dalam menghasilkan laba adalah laporan laba rugi. Tujuan laporan keuangan menurut Ikatan Akuntan Indonesia adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas yang bermanfaat

bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi.

Bisnis *property* dan *real estate* saat ini memberikan peluang dan kesempatan yang cukup terbuka untuk berkembang. Bisnis ini didukung oleh permintaan pasar yang beragam, sehingga banyak investor mengalihkan dananya ke sektor *property* dan *real estate*. Apalagi setiap tahun harga tanah di Indonesia mengalami peningkatan, seiring banyaknya permintaan pasar akan kebutuhan pokok hunian yang layak yang sesuai dengan keinginan konsumen.

Munculnya generasi milenial merupakan salah satu yang menambah keyakinan pengembang terhadap besarnya potensi pasar *property* di Tanah Air. Demikian rangkuman pendapat *Chief Executive Officer* (CEO) Triniti Land Ishak Chandra, Direktur Pemasaran PT Adhi Persada Properti (APP) Wahyuni Sutantri, Sekjen DPP Real Estate Indonesia (REI) Paulus Totok Lusida, *Senior Associate Director* Colliers International Indonesia Ferry Salanto, dan pengamat properti Panangian Simanungkalit.

<https://id.beritasatu.com/home/investasi-properti-melonjak-101/182456>
diakses pada tanggal 04 Mei 2019 pukul 12.30 WIB.

Sektor *property* dan *real estate* memegang peranan penting dalam bidang perekonomian dan pembangunan di Indonesia. Sektor ini juga menjadi salah satu indikator untuk menilai perkembangan perekonomian suatu negara. Sektor *property* dan *real estate* merupakan sektor besar yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan memiliki efek berantai kepada sektor – sektor ekonomi lainnya. Dapat dilihat banyak perusahaan – perusahaan yang mulai merambah ke sektor *property* ini, walaupun sebelumnya perusahaan – perusahaan tersebut bergerak di sektor atau bidang lain.

Tabel 1.1
Perusahaan-Perusahaan Yang Merambah Sektor *Property*

Astra International	Otomotif, Jasa Keuangan, Alat Berat, Pertambangan, Konstruksi & Energi, Agribisnis, Infrastruktur & Logistik, Teknologi Informasi, <i>Property</i>
Djarum	Rokok, Jasa Keuangan, Elektronik, <i>Property</i>
Kompas Gramedia	Media, Penerbitan & Ritel, Perhotelan, Manufaktur, Event Organizer, Pendidikan, <i>Property</i>
MNC Group	Media, Jasa Keuangan, <i>Property</i>
CT Corp	Jasa Keuangan, Media, Retail, Makanan & Minuman, Travel, Hiburan, Perhotelan & <i>Property</i> , Agribisnis
Intikeramik Alamasri Tbk	Keramik, Perhotelan dan <i>Property</i>
RIMO	Ritel, <i>Property</i>
Olympic Group	Furniture, <i>Property</i>

Sumber : www.tirto.id

Meningkatnya aktivitas pada industri *property* dan *real estate* dapat dijadikan petunjuk mulai bangkitnya kegiatan ekonomi. Persaingan akan terjadi pada setiap perusahaan untuk menghasilkan kinerja yang bagus guna menarik investor untuk menanamkan modalnya. Investor tentu hanya akan menanamkan modal pada perusahaan yang memiliki kinerja yang baik sehingga dapat memberikan keuntungan bagi penanam modal. Di Indonesia sendiri, sejumlah emiten *property* dan *real estate* menunjukkan kenaikan kinerja yang signifikan selama beberapa tahun terakhir.

Data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik mengenai Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri Menurut Sektor Ekonomi dalam rentang waktu 2015 – 2017. Dari data tersebut diketahui bahwa unit proyek dan investasi sektor *property* dan *real estate* cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Tabel 1.2
Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri Menurut Sektor Ekonomi (dalam miliaran rupiah), 2015-2017

Sektor Ekonomi	Proyek			Investment		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017
1. Pertanian, Perburuan, Kehutanan, dan Perikanan :	474	668	681	13 112,8	21 671,0	22 947
- Pertanian	441	633	641	12 366,4	21 464,6	22 884
- Kehutanan	15	16	10	471,8	203,8	30
- Perikanan	18	19	30	274,6	2,6	33
2. Pertambangan dan Penggalian	124	134	218	3 946,8	6 033,6	20 635
3. Perindustrian	2 525	3 541	4 513	89 045,3	106 783,7	99 187
4. Listrik, Gas, dan Air	247	472	434	21 946,8	22 794,5	25 428
5. Konstruksi	178	365	283	17 165,4	14 039,1	30 334
6. Perdagangan Besar dan Eceran, Restoran, dan Hotel :	920	1 392	1 517	5 403,9	6 073,3	8 510
- Perdagangan	663	1 024	1 101	1 426,6	4 513,4	3 712
- Restoran dan Hotel	257	368	416	3 977,3	1 559,9	4 797
7. Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi	213	364	313	21 333,9	26 769,6	34 474
8. Real Estate dan Jasa Perusahaan	212	324	459	6 509,9	9 192,8	17 247
9. Jasa Masyarakat, Sosial, dan Perorangan	207	251	420	1 000,9	2 873,2	3 589
Jumlah	5 100	7 511	8 838	179 465,9	216 230,8	262 351

Sumber : Badan Koordinasi Penanaman Modal

Untuk menarik minat investor agar dapat menanamkan sebagian besar dananya maka perusahaan melakukan berbagai macam cara untuk meningkatkan laba perusahaan agar tetap bertahan menghadapi persaingan

usaha yang semakin ketat. Salah satu kebijakan yang dilakukan oleh manajemen adalah dengan melakukan praktik manajemen laba. Schipper dalam Widodo Lo, 2012 [3] mendefinisikan manajemen laba sebagai intervensi atau campur tangan dengan maksud tertentu terhadap proses penyusunan pelaporan keuangan eksternal dengan tujuan untuk memaksimalkan keuntungan pribadi.

Manajemen laba dapat memberikan dampak terhadap kualitas laporan keuangan. Hal tersebut dapat menyebabkan kesalahan pengambilan keputusan investasi bagi investor karena investor tidak mendapatkan informasi yang sebenarnya. Andra Zeptian dan Abdul Rohman, 2013 [4]

Semakin besar suatu perusahaan membuat pemilik tidak bisa secara intensif mengelola perusahaannya sehingga meminta pihak lain guna mengelola usahanya untuk mendapatkan profit. Adanya konflik kepentingan antara pemilik dengan manajemen dalam mengelola perusahaan tentunya menjadi kendala sendiri. Seandainya saja pemegang saham dan manajemen memiliki informasi yang sama mengenai perusahaan, mungkin saja masalah agensi tidak akan rumit. Pemilik bisa lebih mudah mengontrolnya karena sudah memiliki informasi yang lengkap.

Namun adanya asimetri informasi yang tidak seimbang yang dilakukan oleh manajemen kepada pemilik menjadi permasalahan tersendiri. Manajemen mempunyai fleksibilitas untuk dapat mengontrol langsung aktifitas perusahaan dibandingkan pemilik dan bisa dimanfaatkan oleh manajemen untuk memperoleh keuntungan pribadi dengan cara mempengaruhi angka – angka laporan yang disajikan yang bisa menguntungkan dirinya sendiri dan merugikan pemegang saham.

Manajemen bisa saja memberikan informasi yang tidak benar kepada pemilik. Seolah olah perusahaan sedang berkinerja baik walaupun kenyataannya tidak demikian. Ketidaktahuan pemilik memberikan celah bagi manajemen untuk melakukan manajemen laba. Perbedaan kepentingan antara manajemen sebagai agen dengan pemegang saham sebagai *principal* akan menyebabkan konflik kepentingan yang biasa disebut sebagai masalah keagenan atau *agency problem*.

Adanya masalah agensi yang disebabkan oleh konflik kepentingan atau asimetri informasi ini, menyebabkan perusahaan harus menanggung biaya keagenan. Ada tiga jenis utama dari biaya agen: (1) pengeluaran untuk memantau kegiatan manajerial, seperti biaya audit; (2) pengeluaran untuk struktur organisasi dengan cara yang membatasi perilaku manajerial yang tidak diinginkan, seperti menunjuk anggota luar dewan direksi atau restrukturisasi bisnis perusahaan unit dan hirarki manajemen, dan (3) biaya kesempatan yang dapat terjadi ketika pemegang saham dikenakan pembatasan, seperti persyaratan untuk suara pemegang saham pada

permasalahan tertentu, membatasi kemampuan manajer untuk mengambil tindakan yang meningkatkan kekayaan pemegang saham.

Dua faktor tersebut, masalah keagenan dan asimetri informasi menjadi latar belakang munculnya teori dan dugaan tentang adanya praktik manajemen laba. Manajemen memiliki kepentingan yang berbeda dengan pemegang saham ataupun pihak eksternal lainnya. Manajemen akan menggunakan kelebihan informasi yang mereka miliki, misalnya dengan memanipulasi sebagian informasi tersebut yang mungkin akan saling bertentangan dengan kepentingan pihak eksternal yang memiliki lebih sedikit informasi yang valid.

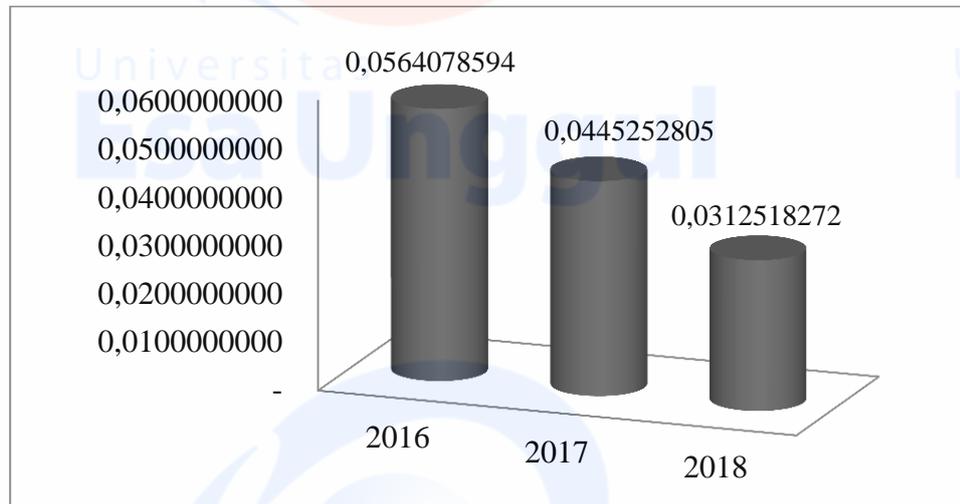
Informasi dikatakan andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya. Informasi yang relevan tetapi tidak dapat diandalkan berpotensi menyesatkan para pengguna informasi tersebut. Agar dapat diandalkan, informasi harus menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya. Selain itu, informasi harus diarahkan pada kepentingan umum pemakai, dan tidak bergantung pada kepentingan pihak tertentu. Kesengajaan untuk tidak mengungkapkan secara lengkap mengakibatkan informasi menjadi tidak benar atau menyesatkan.

Adapun mekanisme yang sangat efektif untuk menyelaraskan berbagai kepentingan tersebut yaitu *corporate governance*, dimana GCG sangat penting digunakan dalam mencapai peningkatan kinerja perusahaan agar mendapat laba yang baik. *Corporate governance* merupakan konsep yang diajukan demi peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi atau *monitoring* kinerja manajemen dan menjamin akuntabilitas manajemen terhadap *stakeholder* dengan mendasarkan pada kerangka peraturan. Menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia, 2001* [5] *corporate governance* didefinisikan sebagai: “Seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak – hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu *system* yang mengendalikan perusahaan.

Tujuan *corporate governance* ialah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*), sedangkan menurut Mentzer, 2011 [6] menyatakan “*corporate governance* pada dasarnya menyangkut masalah siapa (*who*) yang seharusnya mengendalikan jalannya kegiatan korporasi dan mengapa (*why*) harus dilakukan pengendalian terhadap jalannya kegiatan korporasi. Yang dimaksud dengan “siapa” adalah para pemegang saham, sedangkan “mengapa” adalah karena adanya hubungan antara pemegang saham dengan berbagai pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan. Pihak – pihak utama dalam *corporate*

governance adalah pemegang saham, manajemen, dan dewan direksi. Pemangku kepentingan lainnya termasuk karyawan, pemasok, pelanggan, bank dan kreditor lain, regulator, lingkungan, serta masyarakat luas”.

Berikut ini akan disajikan grafik rata – rata manajemen laba perusahaan sub sektor *property* dan *real estate* yaitu sebagai berikut :

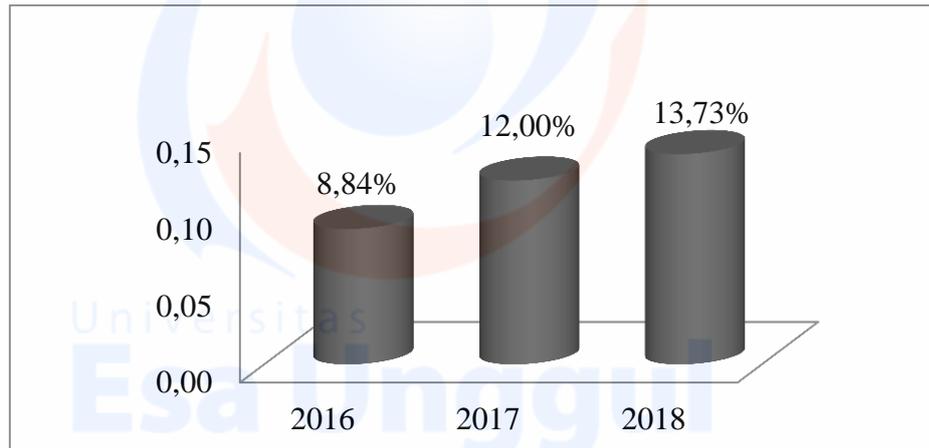


Sumber: www.idx.co.id (data diolah)

Gambar 1.1
Grafik Rata – Rata Manajemen Laba
Perusahaan Sub Sektor *Property* dan *Real Estate* Periode 2016 - 2018

Berdasarkan grafik di atas menunjukkan bahwa rata – rata manajemen laba pada perusahaan sub sektor *property* dan *real estate* mengalami penurunan. Pada tahun 2017 mengalami penurunan 0,01 %, lalu pada tahun 2018 mengalami penurunan kembali 0,01 %. Hal ini bahwa kesadaran akan praktik manajemen laba semakin dikurangi oleh perusahaan sub sektor *property* dan *real estate*.

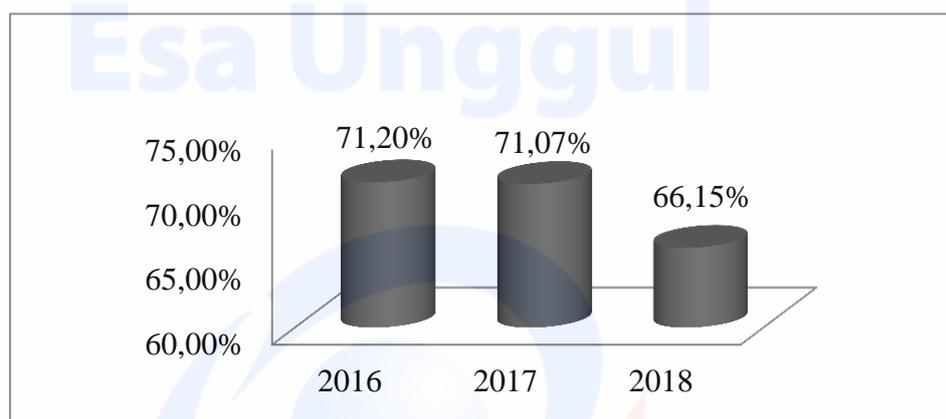
Beberapa faktor yang diduga dapat menjadi penyebab menurunnya manajemen laba diantaranya mekanisme *good corporate governance* telah diterapkan dengan baik serta peran antara agen dan *principal* cukup maksimal. Dibawah ini akan disajikan data mengenai rata – rata kepemilikan manajerial, rata – rata kepemilikan institusional, rata – rata komisaris independen, rata – rata komite audit, rata – rata ukuran dewan direksi dan rata – rata ukuran dewan komisaris pada perusahaan sub sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 – 2018.



Sumber: www.idx.co.id (data diolah)

Gambar 1.2
Grafik Rata – Rata Kepemilikan Manajerial
Perusahaan Sub Sektor *Property* dan *Real Estate* Periode 2016-2018

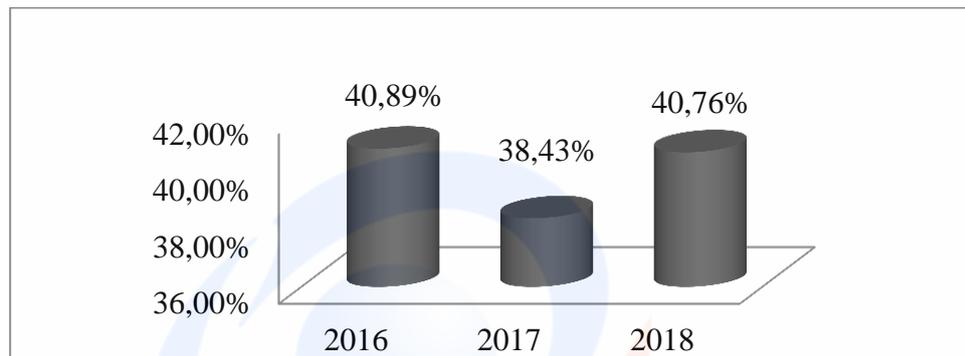
Dari grafik diatas menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial mengalami kenaikan tiap tahunnya. Pada tahun 2017 mengalami kenaikan 3,16 % dan pada tahun 2018 mengalami kenaikan kembali sebesar 1,73 %. Tingginya kepemilikan manajerial disebabkan karena adanya beberapa manajemen perusahaan untuk menambah porsi jumlah kepemilikan saham yang disediakan perusahaan guna meminimalisir adanya informasi asimetri antara *agent* (manajer) dan *principal* (pemegang saham), sehingga dengan adanya kepemilikan manajerial dapat mengurangi potensi manajemen dalam melakukan manajemen laba.



Sumber: www.idx.co.id (data diolah)

Gambar 1.3
Grafik Rata – Rata Kepemilikan Institusional
Perusahaan Sub Sektor *Property* dan *Real Estate* Periode 2016-2018

Dari grafik diatas menunjukkan bahwa rata-rata kepemilikan institusional cenderung mengalami penurunan. Nilai rata-rata kepemilikan institusional pada perusahaan sub sektor *property* dan *real estate* tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 0,13 %, lalu kembali mengalami penurunan pada tahun 2018 sebesar 4,92%. Penurunan kepemilikan institusional disebabkan karena manajemen perusahaan membeli beberapa saham untuk kepentingan manajerial. Turunnya kepemilikan institusional akan memberikan pengaruh pada proses pelaporan keuangan, sehingga dapat memberikan reaksi bagi calon investor institusi atau perusahaan dalam menilai perusahaan dan membeli saham perusahaan.

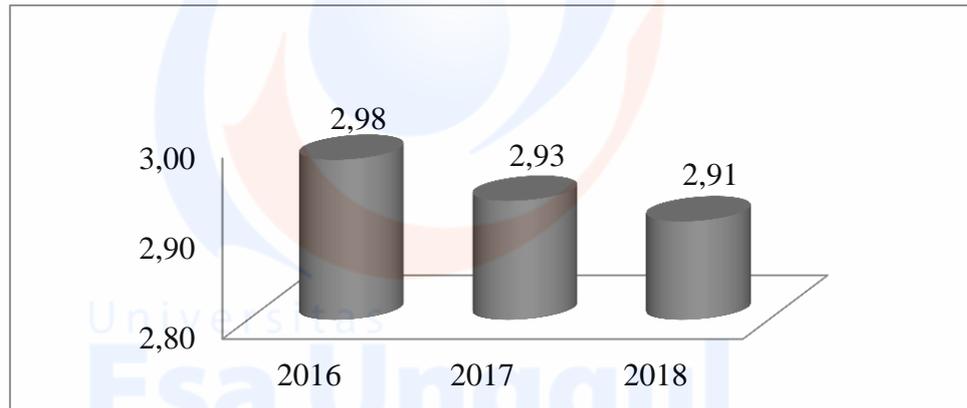


Sumber: www.idx.co.id (data diolah)

Gambar 1.4
Grafik Rata – Rata Komisaris Independen
Perusahaan Sub Sektor *Property* dan *Real Estate* Periode 2016-2018

Dari grafik diatas menunjukkan bahwa setiap tahunnya rata – rata komisaris independen berfluktuatif. Pada tahun 2017 terjadi penurunan sebesar 2,46 %, lalu pada tahun 2018 memiliki kenaikan kembali sebesar 2,33 %. Peningkatan persentase jumlah komisaris independen menggambarkan bahwa jumlah komisaris independen di suatu perusahaan bertambah dari total dewan komisaris yang ada di perusahaan. Sedangkan penurunan persentase jumlah komisaris independen menggambarkan bahwa jumlah komisaris independen di suatu perusahaan berkurang dari total dewan komisaris yang ada di perusahaan.

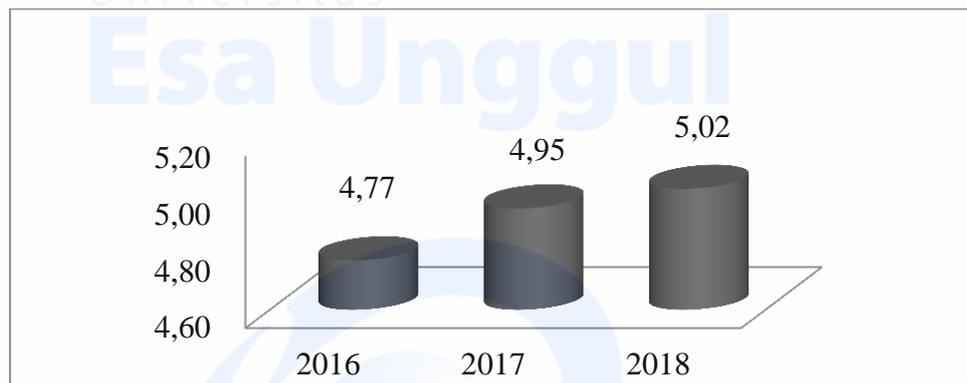
Tingginya persentase jumlah komisaris independen dapat disebabkan tingginya kebutuhan perusahaan atau adanya kebijakan perusahaan dalam menambah jumlah komisaris independen untuk mengawasi jalannya kegiatan perusahaan. Rendahnya persentase jumlah komisaris independen dapat disebabkan rendahnya kebutuhan perusahaan atau adanya kebijakan perusahaan dalam mengurangi jumlah komisaris independen yang dirasa sudah cukup untuk mengawasi jalannya kegiatan perusahaan.



Sumber: www.idx.co.id (data diolah)

Gambar 1.5
Grafik Rata – Rata Komite Audit
Perusahaan Sub Sektor *Property* dan *Real Estate* Periode 2016-2018

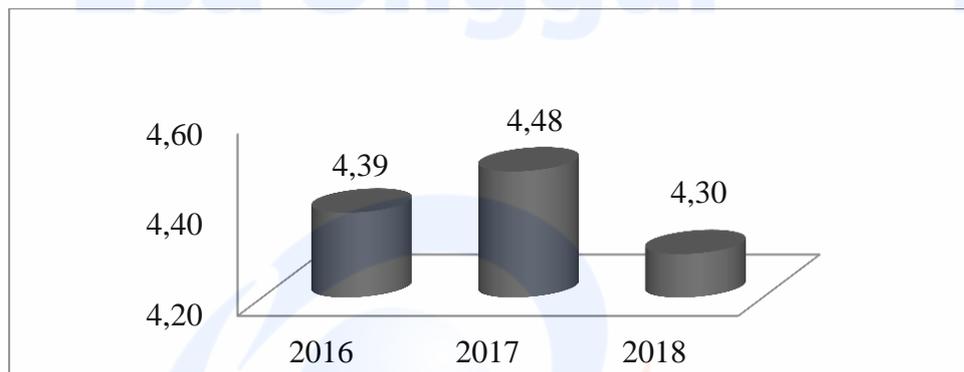
Dari grafik diatas menunjukkan jumlah komite audit cenderung mengalami penurunan tiap tahunnya. Pada tahun 2017 terjadi penurunan sebesar 0,05 %, lalu pada tahun 2018 terjadi penurunan kembali sebesar 0,02 %. Rendahnya penurunan jumlah komite audit menggambarkan bahwa perusahaan merasa dengan jumlah komite audit yang tidak terlalu banyak sudah cukup efektif untuk membantu dan memperkuat dewan komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan atas proses pelaporan keuangan, manajemen resiko, pelaksanaan audit, dan implementasi dari *corporate governance* di perusahaan yang artinya banyaknya jumlah komite audit di perusahaan tergantung kebutuhan dan kebijakan suatu perusahaan.



Sumber: www.idx.co.id (data diolah)

Gambar 1.6
Grafik Rata – Rata Ukuran Dewan Direksi
Perusahaan Sub Sektor *Property* dan *Real Estate* Periode 2016-2018

Dari grafik diatas menunjukkan bahwa ukuran dewan direksi mengalami kenaikan tiap tahunnya. Pada tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 0,18 % dan pada tahun 2018 mengalami kenaikan kembali sebesar 0,07 %. Tingginya ukuran dewan direksi disebabkan karena adanya kebutuhan perusahaan dalam menyusun strategi dan mengarahkan bisnis perusahaan; menyusun kebijaksanaan operasi bisnis serta menjaga keseimbangan kepentingan semua pihak yang terkait dalam perusahaan, misalnya keseimbangan kepentingan pemegang saham mayoritas dan minoritas, kepentingan pemegang saham dan kreditur.



Sumber: www.idx.co.id (data diolah)

Gambar 1.7
Grafik Rata – Rata Ukuran Dewan Komisaris
Perusahaan Sub Sektor *Property* dan *Real Estate* Periode 2016-2018

Dari grafik diatas menunjukkan bahwa setiap tahunnya rata – rata ukuran dewan komisaris berfluktuatif. Pada tahun 2017 terjadi kenaikan sebesar 0,09 %, lalu pada tahun 2018 terjadi penurunan sebesar 0,18 %. Tingginya persentase jumlah ukuran dewan komisaris dapat disebabkan tingginya kebutuhan perusahaan atau adanya kebijakan perusahaan dalam menambah jumlah ukuran dewan komisaris untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan GCG. Rendahnya persentase jumlah ukuran dewan komisaris dapat disebabkan rendahnya kebutuhan perusahaan atau adanya kebijakan perusahaan dalam mengurangi jumlah ukuran dewan komisaris yang dirasa sudah cukup.

Konflik keagenan akan kembali muncul karena adanya faktor – faktor yang melatarbelakangi praktik manajemen laba, diantaranya kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit, ukuran dewan direksi dan ukuran dewan komisaris yang bertugas dan bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap manajemen.

Menurut Yuli Soesetio dalam Rendi Pradana Sari, 2018 [7] kepemilikan manajerial adalah perbandingan antara kepemilikan saham manajerial dengan jumlah saham yang beredar. Pemegang saham dan manajer masing – masing berkepentingan memaksimalkan tujuannya. Oleh karena itu, pengaruh persentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh manajerial harus diimbangi untuk mengurangi praktik – praktik manajemen laba.

Kepemilikan saham perusahaan oleh manajer dapat menyejajarkan kepentingan pemilik atau pemegang saham dengan kepentingan manajer sehingga dapat mengurangi konflik kepentingan yang dapat mendorong manajer melakukan manipulasi (Jensen & Meckling, 1976) [8]. Oleh karena itu, dengan adanya kepemilikan manajerial, maka semakin rendah kecenderungan manajer melakukan manajemen laba.

Penelitian yang dilakukan oleh Shierly Pricillia dan Liana Susanto (2017) variabel kepemilikan manajerial menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan terhadap manajemen laba. Penelitian yang dilakukan oleh Faishal Eka Putra, Rohmawati Kusumaningtias (2019) variabel kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.

Menurut Tarjo, 2010 [9] kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, dan kepemilikan institusi lain. Kepemilikan institusional dianggap lebih profesional dalam mengendalikan portofolio investasinya, sehingga lebih kecil kemungkinan mendapatkan informasi keuangan yang terdistorsi, karena mereka memiliki tingkat pengawasan yang tinggi untuk menghindari terjadinya tindakan manajemen laba.

Secara singkat dapat dikatakan kepemilikan institusional dengan manajemen laba mempunyai hubungan negatif dimana semakin besar persentase saham yang dimiliki oleh korporasi maka semakin kecil kemungkinan terjadi manajemen laba. Ini sejalan dengan teori Bushee, 1998 [10] yaitu dengan adanya kepemilikan saham oleh investor institusional maka proses *monitoring* akan berjalan lebih efektif sehingga dapat mengurangi tindakan manajer dalam hal manajemen laba yang dapat merugikan kepentingan pemilik.

Penelitian yang dilakukan oleh Shierly Pricillia dan Liana Susanto (2017) variabel kepemilikan institusional menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap manajemen laba. Penelitian yang dilakukan oleh Wulan Pramesty (2017) variabel konsentrasi kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.

Komisaris Independen dapat berfungsi untuk mengawasi jalannya perusahaan dengan memastikan bahwa perusahaan tersebut telah melakukan

praktek-praktek transparansi, *disclosure*, kemandirian, akuntabilitas dan praktek keadilan menurut ketentuan yang berlaku di suatu sistem perekonomian negara. Dalam hal ini Komisaris Independen dapat berperan untuk mewakili kepentingan pemegang saham minoritas. Keberadaan Komisaris Independen ini rupanya berhubungan dengan ketentuan penyelenggaraan pengelolaan perusahaan yang baik (GCG), antara lain: 1) Jumlah komisaris independen adalah sekurang-kurangnya 30% dari seluruh jumlah anggota komisaris 2) Perlunya dibentuk Komite Audit 3) Kewajiban perusahaan memiliki Sekretaris Perusahaan (*corporate secretary*).

Sehingga, jika anggota dewan komisaris dari luar meningkatkan tindakan pengawasan, hal ini juga akan berhubungan dengan makin rendahnya aktivitas manajemen laba (Saunders & Cornett, 2007) [11]. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh negatif terhadap praktik manajemen laba karena dengan adanya komisaris independen maka tingkat pengawasan dapat semakin meningkat karena independensi yang dimiliki oleh dewan komisaris.

Penelitian yang dilakukan oleh Faishal Eka Putra, Rohmawati Kusumaningtyas (2019) variabel proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Penelitian yang dilakukan oleh Rahmita Wulandari (2013) variabel komisaris independen berpengaruh positif secara tidak signifikan terhadap manajemen laba.

Menurut Alijoyo dalam Ekowati Dyah Lestari, 2011 [12], komite audit mempunyai fungsi membantu dewan komisaris untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan, menciptakan iklim disiplin dan pengendalian yang dapat mengurangi kesempatan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan, meningkatkan efektifitas fungsi internal audit maupun eksternal audit dan mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian dewan komisaris.

Komite audit mempunyai peran yang penting dan strategis dalam hal memelihara kredibilitas proses penyusunan laporan keuangan, menjaga terciptanya sistem pengawasan perusahaan yang memadai serta dilaksanakannya *good corporate governance*. Sehingga dengan adanya komite audit, maka kecenderungan manajer melakukan manajemen laba semakin rendah.

Penelitian yang dilakukan oleh Wulan Pramesty (2017) variabel komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Penelitian yang dilakukan oleh Faishal Eka Putra, Rohmawati Kusumaningtyas (2019) variabel komite audit berpengaruh terhadap manajemen laba.

Dewan direksi merupakan salah satu sistem manajemen yang memungkinkan optimalisasi peran anggota direksi dalam penyelenggaraan *corporate governance*. Menurut Midiastuty, Pranata Puspa; Machfoedz,

2003 [13], dewan direksi memiliki peran penting dalam perusahaan yaitu untuk menentukan arah dan kebijakan perusahaan baik dalam jangka pendek maupun panjang. Apabila jumlah dewan direksi di dalam suatu perusahaan banyak, maka komunikasi dan koordinasi lebih terjalin dengan pihak manajemen sehingga *corporate governance* baik. Hal tersebut akan mempengaruhi kinerja keuangan sehingga praktik manajemen laba akan semakin rendah.

Penelitian yang dilakukan oleh Rahmita Wulandari (2013) variabel ukuran dewan direksi berpengaruh negatif secara tidak signifikan terhadap manajemen laba. Penelitian yang dilakukan oleh Yunel Fatmawati (2018) variabel dewan direksi tidak berpengaruh signifikan negatif terhadap manajemen laba.

Dewan komisaris dapat berjalan dengan baik apabila setiap kebijakan dan keputusan yang dikeluarkan tidak memihak kepentingan manajemen sebagai agen atau bias kepada kepentingan pemilik. Menurut Vafeas, 2000 [14] menyatakan bahwa peranan dewan komisaris diharapkan dapat meningkatkan kualitas laba dengan membatasi tingkat manajemen laba melalui fungsi *monitoring* atas pelaporan keuangan. Dengan banyaknya jumlah dewan komisaris yang ada maka diharapkan dapat meningkatkan *corporate governance* sehingga manajemen laba juga diharapkan akan menjadi semakin menurun.

Penelitian yang dilakukan oleh Yunel Fatmawati (2018) variabel dewan komisaris berpengaruh signifikan negatif terhadap manajemen laba. Penelitian yang dilakukan oleh Faishal Eka Putra, Rohmawati Kusumaningtias (2019) variabel ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.

Hasil riset penelitian yang dilakukan oleh para peneliti terdahulu tentang pengaruh kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit, ukuran dewan direksi dan ukuran dewan komisaris terhadap praktik manajemen laba masih memberikan hasil yang berbeda – beda dan tidak signifikan.

Penelitian ini merupakan replikasi penelitian tentang praktik manajemen laba pada perusahaan sub sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 – 2018, penelitian ini menggunakan variabel independen yaitu Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, Komite Audit, Ukuran Dewan Direksi dan Ukuran Dewan Komisaris.

Penelitian ini dimotivasi dengan : pertama masih adanya praktik – praktik manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan – perusahaan terbuka, padahal kualitas laporan keuangan sangat diperlukan agar dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi berbagai pihak dalam mengambil keputusan; kedua adanya hasil penelitian tentang pengaruh

kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit, ukuran dewan direksi dan ukuran dewan komisaris yang hasilnya berbeda - beda dan tidak konsisten.

Berdasarkan dari uraian diatas, maka penelitian ini mengambil judul **“Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, Komite Audit, Ukuran Dewan Direksi dan Ukuran Dewan Komisaris Terhadap Praktik Manajemen Laba pada Perusahaan Sub Sektor *Property* dan *Real Estate* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016 – 2018”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Terdapat praktik manajemen laba pada perusahaan sub sektor *property* dan *real estate*.
2. Terdapat mekanisme *corporate governance* sebagai pengelolaan perusahaan yang mengalami penurunan yaitu Kepemilikan Institusional, Komite Audit.
3. Terdapat mekanisme *corporate governance* sebagai pengelolaan perusahaan yang mengalami kenaikan yaitu Kepemilikan Manajerial dan Ukuran Dewan Direksi.
4. Terdapat mekanisme *corporate governance* sebagai pengelolaan perusahaan yang mengalami fluktuatif yaitu Komisaris Independen dan Ukuran Dewan Komisaris.

1.3. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang serta identifikasi masalah yang telah diuraikan diatas, terjadi beberapa masalah yang muncul dari penerapan *good corporate governance*. Pembatasan ruang lingkup penelitian ini agar tujuan dan pembahasan dapat di mengerti dengan baik, tepat dan fokus. Dimana pembatasan masalah penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini hanya menggunakan variabel mekanisme *good corporate governance* sebagai variabel independen (x) dan manajemen laba sebagai variabel dependen (y).
2. Mekanisme *good corporate governance* yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, Komite Audit, Ukuran Dewan Direksi dan Ukuran Dewan Komisaris.
3. Penelitian ini hanya difokuskan pada perusahaan – perusahaan sub sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 - 2018.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini akan dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

1. Apakah terdapat pengaruh kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit, ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris terhadap praktik manajemen laba pada perusahaan – perusahaan sub sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 – 2018 secara simultan?
2. Apakah terdapat pengaruh kepemilikan manajerial terhadap praktik manajemen laba pada perusahaan – perusahaan sub sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 – 2018 secara parsial?
3. Apakah terdapat pengaruh kepemilikan institusional terhadap praktik manajemen laba pada perusahaan – perusahaan sub sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 – 2018 secara parsial?
4. Apakah terdapat pengaruh komisaris independen terhadap praktik manajemen laba pada perusahaan – perusahaan sub sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 – 2018 secara parsial?
5. Apakah terdapat pengaruh komite audit terhadap praktik manajemen laba pada perusahaan – perusahaan sub sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 – 2018 secara parsial?
6. Apakah terdapat pengaruh ukuran dewan direksi terhadap praktik manajemen laba pada perusahaan – perusahaan sub sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 – 2018 secara parsial?
7. Apakah terdapat pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap praktik manajemen laba pada perusahaan – perusahaan sub sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 – 2018 secara parsial?

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji pengaruh kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit, ukuran dewan direksi dan ukuran dewan komisaris terhadap praktik manajemen laba pada perusahaan – perusahaan sub sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 – 2018 secara simultan.

2. Untuk mengkaji pengaruh kepemilikan manajerial terhadap praktik manajemen laba pada perusahaan – perusahaan sub sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 – 2018 secara parsial.
3. Untuk mengkaji pengaruh kepemilikan institusional terhadap praktik manajemen laba pada perusahaan – perusahaan sub sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 – 2018 secara parsial.
4. Untuk mengkaji pengaruh komisaris independen terhadap praktik manajemen laba pada perusahaan – perusahaan sub sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 – 2018 secara parsial.
5. Untuk mengkaji pengaruh komite audit terhadap praktik manajemen laba pada perusahaan – perusahaan sub sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 – 2018 secara parsial.
6. Untuk mengkaji pengaruh ukuran dewan direksi terhadap praktik manajemen laba pada perusahaan – perusahaan sub sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 – 2018 secara parsial.
7. Untuk mengkaji pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap praktik manajemen laba pada perusahaan – perusahaan sub sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 – 2018 secara parsial.

1.6. Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada masalah penelitian, maka manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Perusahaan

Manfaat penelitian ini dapat menjadi masukan terkait dengan pengaruh kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit, ukuran dewan direksi dan ukuran dewan komisaris terhadap praktik manajemen laba di perusahaan sub sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 – 2018.

2. Bagi Investor

Manfaat dari penelitian ini dapat menjadi masukan dan salah satu bahan pertimbangan investor dalam menentukan atau memutuskan untuk berinvestasi pada perusahaan sub sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

3. Bagi Peneliti Lainnya

Manfaat dari penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi penelitian dan dasar pengembangan penelitian berikutnya mengenai pengaruh kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit, ukuran dewan direksi dan ukuran dewan komisaris terhadap praktik manajemen laba di perusahaan sub sektor *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.